

P3KT

Program
Pembangunan
Prasarana
Kota
Terpadu



DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
Unit Pengembangan Program Latihan (UP2L-P3KT)

1. Latar Belakang.

Latar Belakang yang menyebabkan munculnya Konsep P3KT dapat diuraikan sebagai berikut :

Pertama, meskipun belum berhasil mengatasi masalah-masalah makro-ekonomis atau peran serta Tingkat II, pendekatan "Proyek Urban" dianggap sebagai pendekatan yang tepat untuk pembangunan perkotaan di Indonesia.

Kedua, telah terjadi perubahan struktural dalam konteks nasional maupun internasional, termasuk restrukturisasi kelembagaan, masalah-masalah makro-ekonomis dan rekomendasi mengenai pembangunan perkotaan yang diusulkan oleh suatu studi, yakni National Urban Development Strategy (NUDS),

Pengalaman-pengalaman yang memberikan gambaran cerah dalam pendekatan "proyek urban" seperti proyek Urban V yang disponsori oleh IBRD, atau proyek Medan Urban Development Project (MUDP) dan Bandung Urban Development Project (BUDP) yang disponsori oleh ADB telah mendorong pemerintah Indonesia untuk mengembangkan pendekatan tersebut ke daerah-daerah perkotaan lain di Indonesia. Pada tahun 1984 pemerintah melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum merumuskan suatu pendekatan baru dalam pembangunan perkotaan yang disebut Program Pembangunan Kota Terpadu, atau disebut juga P2KT.

Sebagai usaha awal untuk menyempurnakan dan menyebarluaskan pendekatan "proyek urban" terdahulu, P3KT jauh lebih strategis dan mudah dicapai dari pada P2KT yang jangkauannya sangat luas. Pada bulan Juli 1984 diadakan suatu seminar nasional di Cisarua (Jawa Barat) yang dihadiri wakil-wakil dari Bappenas,

Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan, Lembaga Pengkajian Analisa Kebijaksanaan Perkotaan dan Badan-Badan donor seperti Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia, juga wakil-wakil Dinas Pekerjaan umum Tingkat I, lembaga-lembaga penelitian dan perguruan tinggi, di samping konsultan-konsultan dalam negeri dan luar negeri. Pertemuan tersebut membahas garis operasional awal P3KT.

2. P3KT : Prinsip dan Sasarannya.

P3KT merupakan suatu pendekatan untuk merencanakan dan menyusun program prasarana kota secara terpadu yang bergantung pada kemampuan keuangan dan kelembagaan Pemerintah Daerah Tingkat II. Pemerintah Pusat memberikan pedoman kepada pemerintah daerah Tingkat II dalam mempersiapkan program investasi jangka menengah. Tujuan utama penyusunan program jangka menengah P3KT adalah :

- Mendukung pemerintah daerah Tingkat II (Kabupaten dan Kotamadya), dalam menyusun program pembangunan prasarana bidang ke-PU-an di daerah perkotaan seperti : air bersih, fasilitas sanitasi, KIP, MIIP, tata ruang, dan jalan kota.
- Meningkatkan efisiensi penggunaan dana dengan menghindari kegiatan yang tumpang tindih, dan bersamaan dengan itu menyusun kegiatan-kegiatan yang saling mendukung.
- Meningkatkan efektifitas penyediaan pelayanan perkotaan melalui pemberian kesempatan yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah Tingkat II untuk merumuskan prioritasnya sendiri serta menyusun program yang sesuai dengan kebutuhan daerah.

Dengan demikian pendekatan P3KT dimaksudkan untuk memadukan perencanaan tata ruang kota dan komponen sektoral, memobilisasi sumber-sumber dana dan menyesuaikan program-program dengan kebutuhan daerah, dengan melalui pemberian peran yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah Tingkat II dan bukan pada pemerintah pusat. Ada empat prinsip utama dalam pendekatan P3KT, yaitu : Optimasi, mobilisasi sumber daya, desentralisasi dan kesepakatan bersama.

P3KT dimaksudkan untuk mengoptimasikan penggunaan dana yang diperuntukkan bagi pembangunan prasarana dan sarana perkotaan melalui proses keterpaduan program lintas-sektorat yang didasarkan pada prioritas daerah. Alokasi dana dari berbagai sumber (Pusat, Tingkat I, Tingkat II, donor dan swasta) harus mengikuti prioritas program yang diusulkan oleh pemerintah daerah Tingkat II.

Desentralisasi merupakan aspek penentu dalam pelaksanaan P3KT. Program-program terdahulu disusun oleh pemerintah Pusat, khususnya Departemen Pekerjaan Umum tanpa melibatkan Pemerintah Daerah Tingkat II. Pelaksanaan program tersebut dilakukan oleh staf pemerintah pusat yang ditempatkan di Tingkat II. Dalam siklus proyek P3KT, kegiatan dari tahap perencanaan sampai tahap pelaksanaan (dan lebih jauh lagi sampai tahap monitoring sebagai umpan balik) menjadi tanggung jawab pemerintah daerah Tingkat II.

Pemerintah pusat memberikan pedoman umum yang memungkinkan pemerintah daerah Tingkat II menyesuaikan program mereka dengan kebutuhan setempat.

Dalam pelaksanaan P3KT perlu dicapai suatu kesepakatan

antara pihak-pihak yang terlibat dalam program pembangunan perkotaan yang diusulkan. Sehubungan dengan keterbatasan dana Pemerintah Daerah Tingkat II, hanya sebagian biaya yang dapat dipikul oleh Pemda Tingkat II, sisanya sebagian tergantung kepada kemampuan masyarakat dan sektor swasta. Sebagian lagi bisa diperoleh dari Pemerintah Daerah Tingkat I, Pusat, maupun bantuan dan pinjaman luar negeri. Kesepakatan antara pihak-pihak tersebut untuk membiayai program yang diusulkan merupakan kunci P3KT. Hal ini berarti bahwa pada tahap persiapan program P3KT pemerintah daerah Tingkat II harus menyusun usulan yang layak dan sesuai dengan kemampuannya.

3. Siklus program P3KT

Dalam P3KT siklus program terdiri dari 5 tahapan sebagai berikut :

Pertama, pemerintah pusat memberikan pedoman kepada Tingkat II dalam penyiapan program prasarana perkotaan. Ini menghasilkan standard nasional untuk tiap jenis pelayanan (sebagai contoh, target nasional untuk air bersih dalam Repelita IV adalah 75% penduduk perkotaan). Standard teknis masing-masing komponen prasarana kota dan indikasi sumber dana yang tersedia dari pemerintah pusat, disamping bantuan atau pinjaman luar negeri yang telah disepakati, juga ditentukan.

Kedua, Pemerintah daerah Tingkat II menyiapkan program-program berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah pusat untuk proses perencanaan, dengan modifikasi-modifikasi sesuai kondisi dan kebutuhan setempat. Program yang diusulkan harus memenuhi standard-standard teknis, disamping memperhatikan

kemampuan keuangan dan kelembagaan semua pihak yang terkait. Dalam penyiapan program, Pemerintah Daerah Tingkat II didukung oleh staf pemerintah daerah Tingkat I dan sektor pusat mempunyai perwakilan di Tingkat II.

Ketiga, Usulan program diserahkan pada pemerintah daerah untuk dinilai dan disetujui oleh Gubernur, khususnya untuk menetapkan bagian yang akan dibiayai oleh pemerintah daerah Tingkat I. Pemerintah daerah Tingkat I akan menerima usulan-usulan yang jumlahnya sesuai dengan banyaknya daerah Tingkat II yang termasuk dalam batas administrasinya. Karena itu Pemda Tingkat I harus menetapkan kriteria alokasi APBD Tingkat I untuk pembangunan perkotaan. Kriteria setidak-tidaknya harus mempertimbangkan prioritas pembangunan sektoral (karena banyak sektor yang harus dibiayai, bukan hanya terbatas pada pelayanan perkotaan) dan prioritas usulan program dari berbagai pemerintah daerah Tingkat II.

Keempat, apabila pinjaman luar negeri diperlukan, usulan program tersebut diusulkan ke pusat untuk dievaluasi dengan menggunakan langkah-langkah yang sama seperti proses pada Tingkat I. Selain itu pemerintah pusat akan menentukan bantuan luar negeri yang telah menjadi komitmen serta dana pendamping yang diperlukan.

Kelima, usulan program yang telah diteliti dan dimodifikasi akan dikembalikan ke pemerintah daerah Tingkat II.

Pelaksanaan P3KT dikoordinasikan oleh pemerintah daerah Tingkat II dengan sebagian besar pelaksanaan proyek dilakukan oleh staf pemerintah daerah Tingkat II, termasuk PDAM, proyek-proyek lainnya masih dilaksanakan staf sektoral pemerintah pusat yang ditempatkan sebagai perwujudan prinsip "dekonsentrasi"

di Tingkat II. Perlu dicatat bahwa karena P3KT merupakan pendekatan baru dalam kegiatan pembangunan prasarana kota Indonesia, maka sulit untuk mendesentralisasikan seluruh siklus program termasuk pelaksanaan proyek di Tingkat II. Sejauh ini P3KT telah merintis keterpaduan dalam tahap perencanaan dan penyusunan program. Sedikit demi sedikit, langkah menuju desentralisasi penuh dalam pelaksanaan di Tingkat II harus diambil demi pengembangan lebih lanjut dan konsolidasi dari P3KT.

4. Tujuan Pendekatan P3KT.

Pada prinsipnya tujuan utama dari metode penyusunan melalui P3KT yakni sebagai berikut :

- Membantu Pemda Tingkat II dalam menyusun program-program pembangunan prasarana perkotaan di bidang Pekerjaan Umum (khususnya bidang Ke-PU-an).
- Meningkatkan efisiensi penggunaan dana untuk pembangunan prasarana perkotaan dengan menghindari kegiatan tumpang tindih, serta mengusahakan kegiatan yang saling menunjang kegiatan lainnya sehingga diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
- Meningkatkan efektifitas pengembangan sumber-sumber dana potensial yang ditimbulkan oleh investasi pembangunan sebelumnya.

5. Informasi dan Komunikasi.

Informasi dan Komunikasi bagi pembangunan (Prasarana)

perkotaan merupakan suatu aspek penting dalam perencanaan dan pengelolaan kota yang selama ini belum mendapatkan perhatian yang memadai. Hal ini menyebabkan sering munculnya kendala yang sebenarnya tidak perlu terjadi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan.

Secara umum, pembangunan permukiman yang pada saat ini menekankan pada desentralisasi, memberikan tanggung jawab kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu pembangunan daerah disadari sebagai tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Pemerintah Pusat menciptakan kondisi yang memungkinkan sasaran pembangunan sebaik mungkin.

Untuk mensukseskan pembangunan prasarana perkotaan, program informasi dan komunikasi dipandang sangat strategis dan penting untuk membangkitkan motivasi di antara seluruh aktor yang terkait sesuai perannya masing-masing. Peran serta masyarakat dan pihak swasta memerlukan perubahan sikap yang hanya dapat ditimbulkan apabila cukup diberikan informasi, penyadaran, dan pemahaman terhadap peran yang saling melengkapi. Dengan kata lain, masyarakat akan berperan hanya apabila disadari kerja sama apa yang dapat dikembangkan dengan pemerintah untuk memperbaiki kondisi ini. Dipihak lain, pemerintah daerah sendiri seharusnya menyadari dan mempunyai kemauan untuk menyadari bahwa peran-peran masyarakat merupakan metode yang efektif untuk memantapkan proses belajar diantara anggota masyarakat, yang pada akhirnya akan membawa keberhasilan program pembangunan daerah.

Tantangan program informasi dan komunikasi bagi pembangunan perkotaan adalah memberikan sumbangan pada proses perubahan sekitar 76 juta penduduk perkotaan

di Indonesia pada tahun 2000. Selain itu upaya tersebut juga diarahkan kepada seluruh instansi pemerintah yang terkait serta kepada pihak swasta. Sumbangan kegiatan informasi dan komunikasi ini bertujuan untuk mengubah sikap dan tingkah laku dalam upaya menciptakan kondisi yang mendukung dan memungkinkan kerja sama.

Kegiatan Informasi dan Komunikasi menawarkan berbagai alat pesan-pesan, media, dan menggunakan seluruh perangkat tradisional maupun modern untuk memberikan sumbangan bagi tujuan menciptakan iklim pembangunan. Program informasi dan komunikasi memperhitungkan sasaran kebijaksanaan pembangunan pemukiman dan pembentukan kelembagaan dan struktur pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan informasi.

Telah diketahui secara luas bahwa keberhasilan program informasi dan komunikasi, saling pengertian antara masyarakat, pemerintah daerah, dan pihak swasta merupakan hal yang penting. Hal ini melambangkan bahwa hubungan yang saling menguntungkan di antara aktor-aktor tersebut harus dibentuk. Dalam konteks ini informasi dan komunikasi merupakan perlengkapan pokok untuk mencapai keberhasilan dalam merealisasikan pembangunan pemukiman.

Telah diketahui pula bahwa keberhasilan proyek pembangunan yang berorientasi pada masyarakat sangat tergantung pada perhatian yang diberikan pada faktor manusia. Apabila hanya digunakan pendekatan teknis belaka dengan asumsi penerimaan masyarakat secara otomatis, maka hal ini tidak akan membawa hasil. Penerimaan dan peran serta masyarakat merupakan prasyarat bagi pelaksanaan proyek-proyek pembangunan permukiman.